

**EVALUASI TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN
INTERNAL ATAS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG
BANTAENG UNIT BONTOMANAI**

SKRIPSI



SINDI ANTIKA

NIM:105731107019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**EVALUASI TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk. CABANG BANTAENG
UNIT BONTOMANAI**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

SINDI ANTIKA

NIM: 105731107019

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan biarkan kesulitanmu menguasaimu, percayalah bahwa ini malam yang gelap dan hari yang cerah akan datang. Karena sesungguhnya dengan kesulitan akan ada kemudahan”

(QS. AL-Insyirah:5)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.
Alhamdulillah Rabbil’alamin.**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan do’a yang luar biasa untuk anaknya serta memberikan dukungan baik moril maupun material.

**Terima kasih atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik saya
Dan untuk orang-orang yang saya sayang serta almamaterku.**

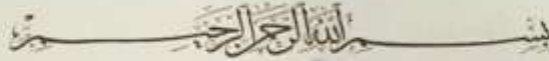
PESAN DAN KESAN

“Lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iara Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Evaluasi Terhadap Struktur Pengendalian Internal Atas Prosuder Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai.

Nama Mahasiswa : Sindi Artika

No. Stambuk/NIM : 105731107019

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Januari 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE., M.Ak
NBM : 0908028803

Abd. Salam, SE., M.Si.CA.SCP
NIDN : 093126607

Mengetahui :



Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603

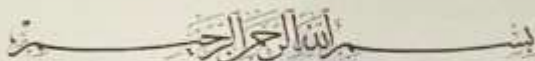
Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM : 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



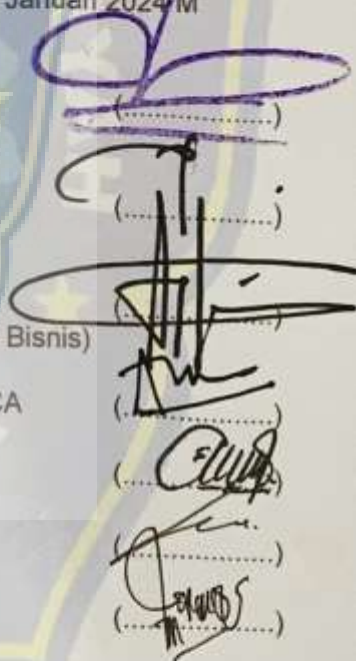
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Sindi Antika, Nim: 105731107019 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/62201/091004/2024, Tanggal 1 Rajab 1445 H/13 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Rajab 1445 H
13 Januari 2024/M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak.CA
2. Saida Said, SE., M. Ak., CPFR
3. Andi Arman, SE., M.Ai., Ak.CA
4. Masrullah, SE., M.Ak



Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

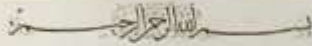


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindi Antika

Stambuk : 105731107019

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Evaluasi Terhadap Struktur Pengendalian Internal Atas
Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Bantaeng Unit Bontomanai

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Sindi Antika
NIM: 105731107019

Diketahui Oleh:



Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program studi

Mira, SE., M. Ak., Ak
NBM : 128 6844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindi Antika

NIM : 105731107019

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Evaluasi Terhadap Struktur Pengendalian Internal Atas Prosedur
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 16 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Sindi Antika
105731107019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Terhadap Struktur Pengendalian Internal Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Starta (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Solvian Patanduk dan ibu Sohrah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan untuk kakak ku tercinta Tamandani Sirta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak. Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE.,M.Ak selaku pembimbing I yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.

5. Bapak Abd Salam, SE.,MSi., Ak.,CA selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program akuntansi Angkatan 2019 khususnya Ak19B yang selalu belajar Bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk sahabatku tercinta Sintya Kartika Angelina serta semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Serta mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman. Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 13 Oktober 2023

Penulis
Sindi Antika

ABSTRAK

SINDI ANTIKA. 2023. *Evaluasi Terhadap Struktur Pengendalian Internal Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai.* Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Bapak Chairul Ihsan Burhanuddin Dan Bapak Abd. Salam

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi struktur pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai dalam mendukung terciptanya praktek-praktek perkreditan yang sehat dan mencegah terjadinya kredit bermasalah. Sampel dalam penelitian ini diambil di kantor BRI Unit Bontomanai Cabang Bantaeng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng dalam aktivitas layanan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana struktur pengendalian internal yang berfokus pada dua dimensi yaitu perencanaan dan pengendalian operasional sedangkan pengambilan keputusan berfokus pada tiga dimensi yaitu proses pengambilan keputusan, penemuan masalah, dan pemecahan masalah.

Kata Kunci : *Pengendalian Internal, Prosedur Kredit, Pengambilan keputusan, Kredit Usaha Rakyat (KUR).*

ABSTRACT

SINDI ANTIKA. 2023. *Evaluation of the Internal Control Structure of the People's Business Lending (Kur) Procedure At PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bantaeng Branch Bontomanai Unit. Thesis Department of Accounting Faculty of Economics And Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervisor By Mr. Chairul Ihsan Burhanuddin And Co-Supervisor Abd. Salam*

The purpose of this study is to evaluate the structure of internal control over the procedure for granting people's business loans (KUR) at PT. Bank Rakyat Indonesia Bantaeng Unit Bontomanai Branch in supporting the creation of sound credit practices and preventing non-performing loans. The samples in this study were taken at the BRI Unit Bontomanai Bantaeng Branch office. The type of research used in this study is descriptive research using a qualitative approach. Data collection is carried out by observation and interviews. Data sources used in data collection are primary data and secondary data. The results showed that the structure of internal control over the procedure for granting people's business loans to PT. Bank Rakyat Indonesia Bontomanai Unit Bantaeng Branch in the activities of providing People's Business Loans (KUR), where the internal control structure focuses on two dimensions, namely planning and operational control while decision making focuses on three dimensions, namely the decision-making process, problem discovery, and problem solving.

Keywords: *Internal Control, Credit Procedures, Decision Making, People's Business Credit (KUR).*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Pengendalian Internal.....	8
2. Kredit.....	16
3. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil.....	23
4. Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit	27
B. Tinjauan Empiris	29
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian.....	34

C. Situs Dan Waktu Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Informan.....	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambar Umum Objek Penelitian	39
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	45
1. Hasil Penelitian	45
2. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	32
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	42
Gambar 2.3 Bagan Prosedur Pemberian KUR.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pengendalian internal adalah proses kegiatan audit, mereview, mengevaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan terhadap tugas dan fungsi organisasi untuk mendapatkan keyakinan yang cukup memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Unsur pengendalian internal terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan atas pengendalian internal.

Pengendalian internal pemberian kredit merupakan suatu sistem yang dilakukan guna menjaga agar kredit yang disalurkan lancar, produktif dan tidak macet. Pengendalian internal pemberian kredit bertujuan untuk mengawal kegiatan perusahaan, menjaga agar kredit yang disalurkan oleh bank tetap aman, melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian apabila terjadi kredit macet atau kredit bermasalah, mengevaluasi prosedur penyaluran kredit, serta memperbaiki kesalahan analisis kredit agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

Menurut Mahmud (2018) Struktur pengendalian internal dirancang dengan tujuan pokok antara lain: menjaga keamanan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan adanya struktur pengendalian internal ini dapat menjadi salah satu alat bantu manajemen

dalam meningkatkan efektivitas perusahaan dalam memberikan analisis, rekomendasi, bimbingan serta review informasi dalam pemberian kredit yang biasa disebut dengan pemberian kredit usaha rakyat (KUR).

Menurut Suyatno (2017) Keberadaan bank merupakan hal yang penting dalam dunia usaha. Keterkaitan antara dunia usaha dengan lembaga keuangan bank memang tidak bisa dilepaskan, apalagi dalam pengertian investasi dan kredit. Pihak bank akan menyalurkan kredit berupa kredit investasi dan modal kerja yang dibutuhkan oleh pihak dunia usaha. Dalam hal inilah pihak bank terus mengembangkan kompetensi yang lain dibidang kredit untuk menggalang pertumbuhan kredit yang berkesinambungan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa intermediasi keuangan.

Menurut Kasmir (2019) Bank sebagai salah satu badan usaha/lembaga keuangan merupakan lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan (deposan) menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk simpanan bank lainnya, sedangkan pihak yang kekurangan dana (debitur) memperoleh bantuan kaungan dari bank dalam bentuk pinjaman.

Adanya periode pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh bank terhadap ketidakpastian tentang pelunasan pinjaman debitur. Munculnya kredit bermasalah selanjutnya dapat mempersulit bank untuk memenuhi kewajibannya kepada deposan. Dalam praktiknya, banyak faktor yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank atau bank

kesulitan memulihkan kredit dari debitur, seperti penolakan pendapatan bisnis debitur, hilangnya bisnis atau penerbangan debitur pengutang.

Adanya beberapa unsur resiko yang dapat menyebabkan ketidakpastian maka dari itu diperlukan suatu pengamana kredit dalam suatu Bank, baik yang bersifat preventif maupun represif. Tujuan adanya pengamanan ini adalah untuk menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Dan untuk meyakinkan kesesuaian praktek dalam perkreditan dengan kebijakan perkreditan bank, diperlukan suatu prosedur pemberian kredit yang baik. Namun dengan adanya prosedur pemberian kredit yang baik diharapkan terjadinya praktek-praktek perkreditan yang tidak sehat dapat dihindari.

Menurut Gede dan Marhaeni (2017) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal kerja, investasi, dan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif, layak dan yang tidak memenuhi persyaratan bank. Maksud dan tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang benar serta pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, Koperasi sebagai mengatasi kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja.

Prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit. Di dalam konsep pemberian kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri, maka dari itu harus didukung dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*)

dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan di harapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari dengan baik. Namun kenyataanya keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat kurang diikuti oleh strategi penyaluran dana yang terarah, sehingga menimbulkan kredit macet dan sebagian bank telah melanggar dari batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limits*) Ramadhanti, A.F (2022).

Fenomena yang sering terdengar adalah kasus kredit bermasalah, yang mana kemungkinan hal tersebut diakibatkan oleh banyak sebab, misalnya seperti ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, prosedur pemberian kredit yang ternyata menyimpang atau tidak sesuai dengan prosedur bank tersebut, dan lain sebagainya. Untuk meminimalkan risiko tersebut, maka dalam menyalurkan kredit bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian juga melakukan analisis pemberian kredit secara tepat. Penilaian kelayakan kredit dilakukan untuk menghindari tidak kembalinya kredit yang telah disalurkan kepada nasabah. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dalam pemberian kredit perlu adanya suatu sistem pengendalian internal yang baik.

Semakin berkembangnya dunia perbankan Indonesia dan sebagai upaya mengatasi dampak negatif dalam pemberian kredit seperti uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu pengendalian di bidang perkreditan. Pengendalian dalam bidang perkreditan merupakan implementasi pengendalian internal yang dapat di terapkan dalam perbankan khususnya di bidang perkreditan. Tujuannya adalah untuk penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan bank dibidang perkreditan agar dapat di lakukan dengan baik serta dapat menghindari adanya penyelewengan. Didalam bentuk

pengendalian ini tidak hanya terlepas dari penjagaan saja, akan tetapi juga bagaimana dengan agar usaha dibidang perkreditan tersebut dapat dihindari dari hal-hal yang boros baik itu waktu, tenaga ataupun dana. Dan untuk peningkatan efisiensi dan pengamanan terhadap harta bank tersebut, tentu administrasi perkreditan harus dapat diandalkan sehingga harus ada pengaturan terlebih dahulu mengenai pengendalian kredit yang diperlukan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bantaeng Unit Bontomanai merupakan salah satu cabang unit dari Bank Rakyat Indonesia di Bantaeng yang memberikan pelayanan berupa pemberian kredit usaha untuk masyarakat setempat atau sering juga disebut dengan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI Unit Bontomanai Cabang Bantaeng sering kali mengalami permasalahan dalam hal pemberian kredit salah satunya yaitu adalah kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan hal yang sangat penting bagi bank, akan tetapi kerap kali pelayanan pemberian kredit mengalami kendala yang berujung pada tidak terbayarnya seluruh pinjaman oleh debitur kepada pihak bank, singkat kata, maka perlu adanya pengendalian internal pada bidang perkreditan yang baik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui pengendalian internal pada proses pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bontomanai Cabang Bantaeng sebagai salah satu unit cabang yang memberikan pelayanan kredit usaha bagi masyarakat dengan judul penelitian. ***“Evaluasi Terhadap Struktur Pengendalian Internal Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.***

Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan adalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu diketahui jawabannya dengan cara: Bagaimana Evaluasi Struktur Pengendalian Internal Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah bagaimana struktur pengendalian internal pemberian kredit usaha rakyat dalam mendukung berkembangnya praktik perkreditan yang sehat dan mencegah kredit bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan menghasilkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. sebagai proses pembelajaran pengendalian internal dan tata cara pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Tbk). Unit Bontomanai Cabang Bantaeng.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan selain teori untuk praktek di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Tbk). Unit Bontomanai Cabang Bantaeng.

3. Dapat menjadi bahan referensi bagi para praktisi, dosen, mahasiswa, dan para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah semua rencana organisasi, metode, pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal adalah pendekatan dan teknik yang melindungi tindakan dari bahaya. Menggunakan sistem pengendalian internal untuk mencegah penggelapan dan penyimpanan lebih efisien. Maka dari itu pemberian kredit usaha sangat penting bagi pihak bank. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus membangun sistem kontrol yang baik terhadap tata cara pemberian kredit usaha.

Mengenai pendapat para ahli tentang Sistem Pengendalian Internal, ada beberapa contoh antara lain:

- a. Menurut Mulyadi (2019), Pengendalian internal adalah Sistem pengendalian internal yang memiliki struktur, metode, dan ukuran yang bekerja sama untuk melindungi aset organisasi, memeriksa keakuratan perhitungan, membuat data lebih mudah, meningkatkan efisiensi, dan mendorong keahlian manajemen.

- b. Menurut Romney dan Steinbart (2022), Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menurut Baridwan (2017), pengendalian internal tidak hanya mencakup inspeksi tetapi juga semua alat pengawasan yang digunakan oleh manajemen. Istilah "pengendalian internal" hanya mengacu pada prosedur yang dipengaruhi oleh teknologi informasi organisasi dan departemen sumber daya manusia untuk mendukung tujuan tertentu.
- d. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) Pengendalian Internal adalah suatu sistem yang mengatur semua metode dan ketentuan perusahaan yang terorganisir untuk mengamankan asetnya, memverifikasi keakuratan data akuntansi, dan meningkatkan produktivitas.
- e. Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal (2020) Pengendalian internal adalah suatu proses yang digunakan dewan komisaris, manajemen, dan karyawan entitas lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tiga kelompok tujuan berikut: a) Keandalan pelaporan keuangan; b) Efisiensi dan efektivitas operasi; dan c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
- f. menurut Krismaji (2021) Pengendalian Internal (*Internal Control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. meliputi metode, ukuran, dan struktur organisasi. Langkah-

langkah ini dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan, memeriksa keakuratan dan keterbatasan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

- g. Menurut (Hayes et al., 2017) pengendalian internal adalah proses. Pengendalian bukan sebuah peristiwa atau situasi, tapi serangkaian tindakan yang meresap ke dalam aktivitas-aktivitas entitas. Tindakan-tindakan tersebut menyebar ke seluruh bagian dan melekat pada cara manajemen menjalankan bisnis.
- h. Menurut (Steinbart dan Romney, 2019) pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar keseluruhan aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen pengendalian internal memberikan jaminan memadai dan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal.
- i. Menurut (Rama dan Jones, 2018) Suatu prosedur yang bertujuan untuk memberikan jaminan yang wajar kepada dewan direksi, manajemen, dan karyawan lainnya tentang tujuannya dikenal sebagai pengendalian internal.

Dari definisi pengendalian internal di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh individu untuk memberikan jaminan yang memadai untuk mencapai tujuan tertentu yang saling terkait. Diharapkan dengan penerapan pengendalian intern dalam setiap operasional bisnis perusahaan, tidak terjadi lagi tindakan-tindakan kecurangan yang merugikan bisnis, seperti penipuan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

b. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal adalah memiliki pilihan untuk memberikan kepastian yang sah dan masuk akal bahwa setiap bank harus menyelesaikan suatu pengendalian untuk membatasi penyimpangan yang akan terjadi. Sementara itu, menurut Mulyadi (2002:178) Ada dua bagian tujuan pengendalian internal.

a. Menjaga kekayaan organisasi

1. Sistem otorisasi yang telah diterapkan merupakan satu-satunya cara agar aset organisasi dapat digunakan.
2. Akuntabilitas organisasi atas aset tercatatnya dikontraskan dengan aset aktualnya..

b. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi

1. pelaksanaan transaksi melalui sistem O
2. otorisasi yang telah ditetapkan.
3. pencatatan transaksi terakhir dalam catatan akuntansi.

c. Karakteristik dan Keterbatasan Pengendalian Internal

a. Karakteristik Pengendalian Internal

Dalam pengendalian internal yang baik terdapat sebuah karakteristik yang meliputi beberapa hal seperti yang ada di bawah ini yaitu:

1. strategi organisasi yang memungkinkan untuk membayar kembali tanggung jawab masing-masing fungsi dengan cara yang tepat.

2. sistem pencatatan yang baik dan struktur otoritas yang memungkinkan kontrol akuntansi yang memadai atas aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya.
3. Mengikuti praktek dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap bagian organisasi.
4. Pengamat harus memiliki kualitas yang sesuai dengan tugasnya.

Karakteristik yang baik akan menghasilkan pengendalian internal yang efisien. Rencana sistem otoritas harus dimasukkan dengan benar ke dalam pelaksanaan pekerjaan mereka untuk memastikan prosedur penyimpanan catatan yang tepat, praktik yang baik, dan kualitas pengamat. selain membuat pekerjaan lebih mudah dan pengendalian internal lebih efektif dalam mencapai tujuan.

b. Keterbatasan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal mungkin tidak tercapai karena keterbatasan pengendalian internal. Keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam penilaian
2. Gangguan
3. Kolusi
4. Pengabaian manajemen
5. Manfaat versus biaya

1. Kesalahan dalam penilaian

Kesalahan dalam memperhitungkan keputusan bisnis yang dibuat saat melakukan tugas rutin yang dapat diselesaikan oleh manajemen atau

karyawan lainnya. Kesalahan semacam ini biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi, kurangnya waktu, atau tekanan lainnya.

2. Gangguan

Terdapat kekeliruan dalam perintah, terjadi kesalahan akibat keterlambatan, dan personel atau sistem prosedur diubah untuk sementara atau permanen.

3. Kolusi

Kerja sama antar pihak terkait adalah kolusi, dimana para pihak seharusnya saling mengawasi tetapi malah bekerja sama untuk menyembunyikan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

4. Pengabaian Manajemen

Manajemen yang mengabaikan kebijakan dan prosedur yang diterapkan semata-mata untuk keuntungan pribadi menyebabkan gagalnya pengendalian intern.

5. Manfaat versus biaya

Manfaat yang diharapkan dari penerapan pengendalian internal tidak dapat melebihi biaya yang dikeluarkan untuk penerapannya.

d. Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Ada beberapa komponen yang membentuk pengendalian internal, akan tetapi komponen sistem tersebut saling berhubungan.

Menurut Mulyadi (2020) unsur- unsur pokok pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi spesifik adalah tanggung jawab yang fungsional. Kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan pokok perusahaan adalah struktur organisasi. Misalnya, setiap fungsi dipisahkan untuk melakukan semua tahapan transaksi.
2. Prosedur untuk menyimpan catatan dan sistem resmi yang melindungi aset, utang, pendapatan, dan biaya secara memadai. Setiap organisasi perlu mengembangkan suatu sistem yang mengatur pembagian kewenangan untuk setiap otorisasi transaksi. Keakuratan dan kompleksitas (keandalan) data yang dicatat dalam catatan akuntansi akan dipastikan dengan prosedur pencatatan yang efektif. Oleh karena itu, sistem otorisasi akan menjamin input akuntansi yang akurat.
3. cara yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi. Jika departemen tanggung jawab fungsional tidak menemukan cara untuk memastikan bahwa sistem otoritas yang ditetapkan dan prosedur pencatatan diikuti dengan benar, mereka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.
4. pegawai yang kinerjanya sesuai dengan tugasnya.

Menurut COSO (*Commite of Sponsoring Organization*) yang merupakan framework yang dibuat oleh sektor swasta dengan gabungan dari 5 professional association yaitu: AICPA (*The American Institute of Certified Public Accountants*), AAA (*The American Accounting Association*), FEI

(*Financial Executives International*), IIA (*The Institute of Internal Auditors*), IMA (*The Institute of Management Accountants*), Pengendalian internal (*internal control*) terdiri atas 5 komponen, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Faktor manusia yang mencakup kompetensi, integritas, dan prinsip etika, merupakan inti dari setiap bisnis. filosofi dan metode manajemen; pendekatan yang diambil manajemen untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya; pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, serta fokus dan arahan Direksi.

2. Penilaian Risiko

Perusahaan harus menyadari dan menanggapi risiko. Agar perusahaan dapat berfungsi secara terkoordinasi, persaingan harus terintegrasi dengan aktivitas keuangan lainnya. Selain itu, perusahaan harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko terkait.

3. Aktivitas Pengendalian

Tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari proses pengendalian kegiatan perusahaan pada setiap tingkatan dan unit struktur organisasi BUMN dikenal dengan kegiatan pengendalian. Kegiatan tersebut menyangkut kewenangan, wewenang, verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi prestasi kerja, pembagian tugas, dan pengamanan aset.

4. Informasi dan Komunikas

Proses penyampaian laporan mengenai operasional, keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan sistem informasi dan komunikasi.

5. Monitoring

Monitoring adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal yang meliputi fungsi audit intern pada setiap tingkat dan unit dalam struktur perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal kepada Direksi dan tembusannya diberikan kepada Komite Audit.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere* yang berarti kepercayaan atau *truth* atau *faith*. Dalam hal ini yang berarti suatu kebenaran atau kepercayaan dimana seseorang memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan dalam meningkatkan tingkat ekonomi seseorang dan ingin mengajukan suatu bentuk pernyataan pinjaman bantuan dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Undang-undang Perbankan (UU No.) menyatakan bahwa 10 tahun 1998 adalah “pengurusan uang atau surat-surat tagihan yang dapat disamakan dengan mengingat adanya kesepakatan kredit antara bank dan berbagai perkumpulan yang menyepakati persetujuan untuk mengurus kewajiban setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga”.

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) mendefinisikan kredit sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu”, yang didasarkan pada suatu perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang memungkinkan pihak perjanjian (debitur) untuk membayar utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan.

Adanya kepercayaan merupakan intisari dari istilah kredit. Selain itu, ada komponen tambahan yang bekerja sama untuk saling menguntungkan. Selain itu, dari sudut pandang kreditur, memanfaatkan modal melalui counterperformance merupakan bagian terpenting dari kegiatan perkreditan saat ini. Namun dari sisi debitur, kreditur membantu menutupi kebutuhan melalui prestasi.

b. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit yang disponsori pemerintah atau layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) atau usaha tanpa rekening bank yang memenuhi syarat. Dengan kata lain, usaha tersebut masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat mengembalikan pinjaman tersebut. KUR sendiri mencakup berbagai jenis usaha, terutama yang bergerak di bidang industri produktif seperti pertambangan, pertanian, perindustrian, perikanan, dan kelautan. Diharapkan semua jenis usaha dapat menawarkan berbagai kemudahan kepada masyarakat.

c. Unsur- Unsur Kredit

Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam pemberian kredit menurut (Purnamawati, 2020) menyatakan sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Pemberian pinjaman memiliki keyakinan bahwa uang, barang atau jasa yang diberikan sebagai kredit akan diterima lagi di masa depan. Koperasi menunjukkan kepercayaan ini setelah melakukan penyelidikan internal dan eksternal terhadap pelanggan di masa lalu.

2. Kesepakatan

Sebagaimana tertuang dalam suatu perjanjian, perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan penerima kredit dimana para pihak memenuhi hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Kredit menetapkan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu pelunasan kredit, bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, yang disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Resiko

Resiko merupakan segala sesuatu yang berdampak negatif. Risiko kredit tidak tertagih (kredit macet) dapat muncul ketika ada masa tenggang. Risiko meningkat secara proporsional dengan panjang kredit.

5. Balas jasa

Insentif yang dikenal sebagai bunga untuk memberikan kredit atau layanan disebut kompensasi. Keuntungan bank juga berupa kompensasi berupa biaya administrasi kredit dan bunga.

d. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Ade Onny Siagian (2021) jenis-jenis kredit jika dilihat dari segi kredit antara lain adalah:

1. Dilihat dari segi kegunaan,
 - a. Kredit investasi untuk perluasan usaha, pembangunan proyek baru, atau rehabilitasi pabrik.
 - b. Kredit Modal Kerja untuk peningkatan produksi yang berkaitan dengan operasional. biaya yang terkait dengan prosedur manufaktur perusahaan.
2. Dilihat dari segi tujuan
 - a. Kredit Produktif Digunakan untuk perbaikan, usaha, atau investasi, jika dilihat dari segi tujuan. Kredit ini diberikan untuk mengirimkan tenaga kerja dan produk
 - b. Kredit konsumtif dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha.
 - c. Kredit perdagangan digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang yang pembayarannya diharapkan dari penjualan. Kredit yang diberikan kepada para pedagang untuk membiayai kegiatan perdagangannya dikenal dengan kredit perdagangan.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. Pinjaman dengan jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun yang biasanya digunakan untuk modal kerja
- b. Kredit dengan jangka menengah jangka waktu pinjaman berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya diberikan untuk modal kerja dan investasi.
- c. Kredit dengan jangka waktu pelunasan yang panjang kredit dengan jangka waktu pengembalian yang panjang disebut dengan kredit jangka panjang.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Kredit yang dijamin adalah kredit yang disertai dengan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan menjaga setiap kredit yang diberikan.
- b. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa agunan dengan imbalan barang tertentu atau perorangan yang diberikan berdasarkan sifat, prospek usaha, dan loyalitas calon debitur.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. Pinjaman untuk usaha perkebunan atau perkebunan rakyat disebut kredit pertanian.
- b. Kredit peternakan dalam hal ini untuk jangka pendek, seperti kandang ayam atau kandang sapi atau kambing.
- c. Kredit industri adalah jenis kredit yang digunakan untuk membiayai usaha besar, menengah, atau kecil.

- d. Kredit pertambangan merupakan kredit perusahaan pertambangan. Dia biasanya membiayai perusahaan pertambangan jangka panjang, seperti pertambangan minyak, timah, atau emas.
- e. Kredit Pendidikan merupakan kredit yang dapat diberikan untuk membangun prasarana dan sarana pendidikan atau kepada siswa sebagai kredit.
- f. Kredit untuk profesi merupakan kredit yang diberikan untuk para kalangan profesi seperti guru, dokter, dan pengacara menerima kredit.
- g. Pinjaman perumahan kredit yang biasanya berjangka panjang dan digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

e. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir dalam buku (Purnamawati, 2020) Kredit dalam kehidupan keuangan sekarang dan selanjutnya dalam pertukaran memiliki kemampuan yang menyertai antara lain:

1. Meningkatkan daya guna uang

Uang dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya melalui kredit, para pelaku usaha menikmati kredit yang diberikan untuk memperluas atau memperbesar usahanya ataupun memulai usaha baru.

2. Meningkatkan arus dan lalu lintas uang

Uang yang dikeluarkan atau disalurkan akan dikirim ke tempat lain sehingga tempat yang kekurangan uang bisa mendapatkan uang lebih banyak dengan mendapatkan pulsa.

3. Meningkatkan kemanfaatan barang

Kredit yang dihibahkan dapat digunakan untuk mengolah barang yang tidak dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh debitur.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu daerah ke daerah lain, sehingga mengakibatkan bertambahnya atau bertambahnya jumlah barang yang beredar di daerah lain.

5. Alat stabilitas ekonomi,

kredit dapat membantu masyarakat membeli lebih banyak dari apa yang mereka butuhkan dan membantu negara mengekspor barang ke negara lain untuk meningkatkan cadangan devisanya.

6. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Pelaku usaha akan selalu berhubungan dengan baik untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya, kredit yang diterima digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Kredit dapat digunakan untuk pemerataan pendapatan, maksudnya jika suatu kredit disalurkan untuk membangun usaha baru maka akan semakin memperkecil nilai pengangguran.

8. Alat hubungan ekonomi internasional

Kredit yang disalurkan dari satu negara ke negara lain akan meningkatkan hubungan internasional, karena akan meningkatkan kerja sama pula di berbagai bidang serta terciptanya perdamaian dunia.

3. Prosedur Pemberin Kredit Usaha Kecil

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing (Suyatno, dkk: 2022).

Secara umum prosedur dapat dipahami sebagai langkah atau tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk atau pedoman yang ditetapkan untuk digunakan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Sebaliknya, Prosedur adalah urutan pekerjaan klerikal yang diatur untuk memastikan perlakuan yang seragam dari transaksi bisnis yang sering terjadi dan biasanya melibatkan banyak individu dalam satu atau lebih. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk memudahkan bank mengevaluasi kelayakan aplikasi kredit untuk mencegah kredit bermasalah.

Adapun prosedur/tahap pemberian kredit usaha kecil terbagi menjadi 2 tahap yaitu:

a. Tahap Permohonan Kredit

Nasabah pemohon harus melengkapi pernyataan awal ini untuk mengajukan pinjaman atau kredit, yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan dan mengisi daftar isian yang disediakan oleh bank.

b. Tahap Analisis Kredit

Permohonan kredit yang sehat harus dilandasi dengan analisis yang cermat dan menyeluruh terhadap permohonan kredit pada tahap analisis kredit. Biasanya, penilaian umum harus dilakukan oleh bank dengan menggunakan 5C, sebagaimana dikemukakan oleh Rio Christianawan (2021). penilaian dengan 5C ini berisi tentang penilaian "*character, capacity, capital, Collateral, Condition*" adalah sebagai berikut:

a. Character

Melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon debitur atau nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kriteria character ini akan dilihat dari due diligence yang dilakukan oleh pihak kreditur. Dari karakter ini dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon debitur atau penjamin tersebut, apakah pernah memiliki catatan buruk sebelumnya.

b. Capacity

Capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu penilaian pada kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Kriteria ini dilihat dari bagaimana debitur dan atau penjaminnya tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya. Jika pihak kreditur menilai bahwa debitur dan atau penjaminnya tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya, besar pembiayaan tersebut akan ditolak.

c. Capital

Modal yang dimiliki calon debitur, yang khususnya diberlakukan pada debitur yang meminjam dengan peruntukan usaha atau bisnisnya dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh debitur tersebut. Selain itu, pihak kreditur juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan debitur dan atau penjaminnya untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pembiayaan.

d. Collateral

Jaminan yang diberikan pada calon debitur saat mengajukan pembiayaan pada kreditur. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak kreditur jika nantinya debitur tidak dapat membayar kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari pembiayaan yang diberikan.

e. Condition

Kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan debitur. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya kreditur akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan debitur dan atau penjaminnya dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

c. Tahapan Keputusan Kredit

Setelah tahapan tersebut dan proses rekomendasi dari pejabat bank terkait, tahapan keputusan kredit dapat diselesaikan dengan keputusan disetujui atau ditolak. Sebaliknya, surat klaim akan dikirimkan bersama dengan aplikasi jika ditolak. Sedangkan jika kredit diberikan, akan dibuat perjanjian kredit yang merinci jenis kredit, jumlah kredit yang diberikan, jangka waktu, biaya yang harus dibayar, suku bunga, jaminan kredit, dan rincian lainnya. Kredit juga dapat diperoleh setelah surat yang diperlukan telah diambil. Tergantung dari syarat dan tujuan kredit, kredit ini dapat digunakan secara bertahap atau sekaligus.

Bank akan mencatat penarikan kredit debitur sebesar pokok kredit. Kepala kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan oleh peminjam dan belum diganti oleh pemegang utang. Saldo kredit adalah istilah lain untuk pokok kredit ini. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dilakukannya sendiri di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001: "Kredit diakui pada saat pencairan pokok kredit" sebagaimana dinyatakan dalam II.8A.2) Dalam dalam rangka pembiayaan bersama, kredit diakui sebesar pokok kredit yang merupakan tagihan bank.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001: "Pada saat akad kredit, bank akan mendapat provisi kredit, yaitu biaya-biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit telah disetujui," disebutkan dalam III.8A.8 .Dengan mengurangi jumlah yang ditentukan dari kas atau rekening pelanggan, bank akan menandainya sebagai kredit.

Selain itu, sejumlah uang akan dibayarkan untuk mengurangi hutang atas fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan oleh debitur.

4. Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit

a. Pengertian Pengendalian Internal Pemberian Kredit

Pengendalin kredit yang dikenal sebagai pengendalian internal pemberian kredit digunakan untuk mencegah gagal bayar kredit dan menyelesaikan gagal bayar kredit. Tujuan pengendalian kredit adalah untuk memastikan bahwa kredit diberikan secara teratur, produktif dan lancar. Lancar dan bermanfaat dicirikan sebagai kredit yang dapat dihapus bersama dengan bunga sesuai kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Tujuan Pengendalian Internal Pemberian Kredit

Tujuan utama pengendalian intern perkreditan adalah untuk mengarahkan kegiatan perkreditan guna mengurangi jumlah kredit macet dan kegagalan kredit.

c. Tahap-Tahap Pengendalian Internal Pemberian Kredit

Penyusunan dan pengembangan pedoman yang diperlukan dan kegiatan pengendalian internal merupakan dua tahap yang direkomendasikan dari tahap pengendalian internal, menurut Narotama dan Wirawan Radianto.

1. Agar departemen-departemen tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya dengan benar, cepat, dan tepat, maka diperlukan pedoman penyusunan dan pengembangan yang dilakukan oleh beberapa departemen. Manual sistem sektional akan digunakan untuk membuat dan mengirimkan dokumen ini.

2. Kegiatan satuan pengendalian internal dalam berbagai dimensi waktu disebut sebagai kegiatan pengendalian internal. Setiap transaksi, setiap hari, setiap bulan, atau secara berkala membutuhkan penyelesaian beberapa aktivitas pengendalian internal. Unit pengendalian intern wajib membuat laporan pengendalian internal setelah selesainya pengendalian.

d. Jenis-jenis Pengendalian Internal Pemberian Kredit

Ada tiga kategori berbeda dari pengendalian internal yang berlaku: pengendalian internal rutin, pengendalian program internal, dan pengendalian internal khusus.

1. Pengendalian internal rutin

Dalam pengendalian internal harian, pengendalian internal rutin dapat dilakukan di setiap departemen kredit, divisi umum, bagian dana kas umum, dan departemen pembukuan.

2. Pengendalian Program Internal

Dalam rangka pengendalian program internal, setiap program perusahaan telah dilakukan pengendalian internal. Untuk menjamin bahwa program tersebut sesuai dengan rencana yang telah disusun, pengendalian intern harus berfungsi. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas, evaluasi program, dan program pengendalian manajemen adalah contoh-contoh pengendalian yang dapat diterapkan.

3. Pengawasan internal khusus

Ketika pemimpin (direktur) meyakini bahwa pengendalian internal khusus diperlukan, maka pengendalian internal tersebut dilaksanakan sesuai dengan instruksi khusus.

B. Tinjauan Empiris

Ayu dan Nyoman (2018), pengendalian internal, pemberian kredit. Dengan menggunakan metode deskriptif atau kualitatif, hasil penelitian ini dapat disimpulkan kredit tersebut diberikan pada PT. BPR dengan menggunakan pengendalian internal. Kesulitan yang dihadapi antara lain: jaminan hilang, karakter buruk, dan analisa kredit yang tidak tepat. Upaya yang telah dilakukan adalah: Rescheduling, reorganisasi, reconditioning, dan billing dilanjutkan.

Artining dan Adi (2017) evaluasi, sistem pengendalian internal, kredit, Pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk gambaran sistem pengendalian internal PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt menunjukkan kecukupan dan kualitas sistem pengendalian internalnya. Metode uji kepatuhan stop-or-go sampling menggunakan atribut sampling untuk menunjukkan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dikatakan berjalan dengan baik.

Amirah (2020), Pemberian kredit, dan metode sistem pengendalian internal, baik kuantitatif maupun kualitatif, termasuk prosedur pemberian kredit dan sistem pengendalian internal PT. Bank Mega Cabang Makassar

sangat baik dan jelas. PT. Bank Mega Cabang Makassar harus menyiapkan cara khusus untuk menemukan dan menelusuri penyimpangan dalam operasional, keuangan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dengan nasabah, debitur, dan pihak eksternal lainnya.

Weni (2019), pengendalian internal, kolektibilitas kredit. Metode analisis deskriptif kuantitatif (regresi dan kolerasi) Hasil penelitian pada PT. BPR Universal Mandiri Puncak menunjukkan hubungan antara pengendalian internal dan kolektibilitas kredit sebesar 0,9176 atau 91.76% yang menunjukkan bahwa adanya hubunga yang kuat dan positif antara pengendalian internal dengan kolektibilitas kredit. Sementara pengaruh variable x dan variable y sebesar 0,8281 atau 82,81% dengan persamaan regresi yang terbentuk $Y = 0,675 + 0,85X$ dan setelah dilakukan pengujian hipotesis ternyata keduanya berpengaruh signifikan.

Putu dan Ketut (2022), jenis-jenis pengendalian internal, prosedur umum, struktur pengendalian internal, kolektibilitas, kredit bermasalah. Metode analisis deskriptif atau kuantitatif (regresi linear berganda), hasil penelitian mengemukakan bahwa struktur pengendalian internal kredit berpengaruh negatif dan signifikan pada kredit bermasalah BPR di Kabupaten Buleleng, sedangkan untuk jenis-jenis, prosedur umum pengendalian internal dan kolektibilitas kredit tidak berpengaruh signifikan.

Atriani dan Maryana (2017) Dampak Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit (Survei pada PT. Mandala Multifinance Tbk. Kota Lhokseuma) melalui penggunaan analisis data kuantitatif. Persetujuan kredit dipengaruhi secara signifikan oleh pengendalian internal. Ada hubungan

yang kuat antara pinjaman dan pengendalian internal. Keterkaitan antara pemberian kredit pada PT. Mandala Multifinance Tbk. Kota Lhokseuma dapat dijelaskan dengan pengendalian internal.

Dhamar Dimas Prasadhana, Ni Luh Gede Erni Sulinda wati, SE. Ak, M.Pd, Ni Kadek Sinarwati, S.E., M.Si., Ak.3 (2017) Pengendalian Internal Pemberian Kredit Usaha Kecil Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. , Unit Banyuwatis Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau deskriptif. 1) Kondisi, prosedur, dan proses pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah menunjukkan bahwa sistem aplikasi kredit baik. 2) Hasil observasi yang dilakukan mengenai penerapan pengendalian intern pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dikatakan cukup baik. 3) Sistem Pengajuan Kredit dan Penerapan Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sudah Efektif.

Ammia Safitri (2021) Berdasarkan analisis wawancara dengan pihak internal bagian perkreditan, maka dilakukan pengujian efektivitas pengendalian internal terhadap kinerja kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto Kota Semarang dengan menggunakan metode penelitian pengendalian organisasi deskriptif atau kualitatif. Berdasarkan analisis dari wawancara dengan pihak internal bagian kredit, pengendalian dokumentasi secara teoritis efektif. Berdasarkan analisis wawancara dengan pihak internal bagian kredit, pengendalian akuntabilitas secara teoritis efektif.

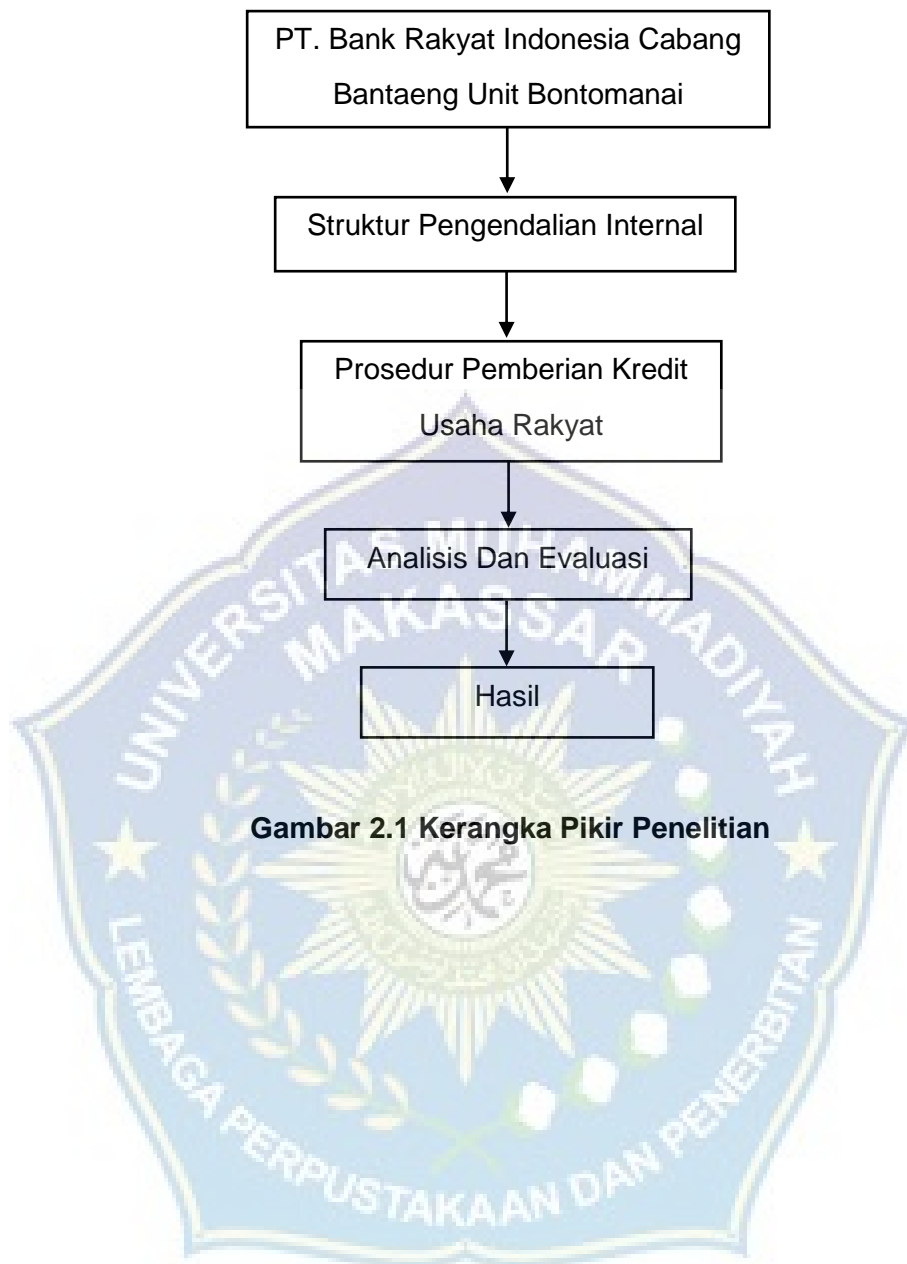
Sonia Dwi Fatiah, Darminto, M.G. Wi Endang NP (2020) Upaya Pengendalian Internal: Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit

Usaha Rakyat (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau deskriptif. Menurut temuan penelitian, mantri melakukan dua fungsi secara bersamaan. kelengkapan file. Ketika kredit tidak dapat diproses atau ditolak, bukti proses penolakan kredit tidak mencukupi, dan masih belum ada sertifikat penolakan kredit dengan alasan penolakan kredit.

Maya Cintya, Siti Maria Widayati Septarin a Prita (2022) Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif atau internal kualitatif control terhadap kegiatan perkreditan di Bank UMKM Cabang Jember, Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Mendukung Efektivitas Sistem Perkreditan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Bank UMKM Cabang Jember) telah beberapa kelemahan, tetapi pengendalian secara keseluruhan telah beroperasi secara efektif.

C. Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir yang ada pada gambar dibawah ini, bahwa penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng dengan menggunakan struktur pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) sebagai alat untuk menyediakan data informasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh menyediakan data serta informasi mengenai nasabah yang melakukan permohonan pinjaman kredit usaha rakyat.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Suatu metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa seperti yang terjadi. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, meskipun metode yang digunakan bersifat kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada evaluasi terhadap struktur pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai.

C. Situs dan Waktu Penelitian

Penelitian memerlukan tempat dan waktu untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka dari itu penulis memilih tempat penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai. Penulis akan mengupayakan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan pada bulan Mei sampai Juli 2023.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu adalah:

1. Data primer

Data primer mengacu pada informasi yang dapat diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan staf kredit atau karyawan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit

2. Data sekunder

Data yang dapat diperoleh dari dokumen pendukung seperti pemberian kredit, struktur organisasi organisasi, dan riwayat singkat merupakan contoh data sekunder.

E. Informan

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala unit perusahaan Bank BRI Unit Bontomanai.
2. Mantri Bank BRI Unit Bontomanai.
3. Karyawan Bank BRI Unit Bontomanai.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pengumpulan data dari ruang lingkup penelitian dari dokumentasi internal perusahaan adalah dokumentasi.

2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang berkepentingan yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bontomanai Cabang Bontomanai. Untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, proses wawancara dilakukan secara formal dan menyeluruh. Penelitian ini melakukan wawancara dengan manajer unit dan karyawan perusahaan.
3. Kajian observasional dan pencatatan terhadap fenomena yang menjadi obyek kajian dalam kajian ini merupakan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat proses dan setelah selesainya pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari para narasumber yaitu kepala unit dan staf perusahaan. Serta mengumpulkan data sekunder yang diberikan oleh perusahaan dan melakukan observasi secara langsung.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Hasil observasi penelitian kualitatif akan diperoleh banyak data yang berupa catatan-catatan narasi lapangan. Catatan-catatan itu bukanlah data yang akan ditampilkan begitu saja dalam laporan penelitian, tetapi harus melalui proses reduksi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilantindakan. Dengan mencermati penyajian data, penelitian akan lebih mudah memahami yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada tahun 1960 Peleburan BRI, BKTN, & NHM, pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan

Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 kedudukan BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

2. Visi dan Misi Bank BRI

a. Visi Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah

b. Misi Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng

1. Memberikan yang terbaik

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dmengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Menyediakan pelayanan yang prima

Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (performance-driven culture), teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operational dan risk management excellence.

3. Bekerja dengan Optimal dan Baik

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate Governance yang sangat baik.

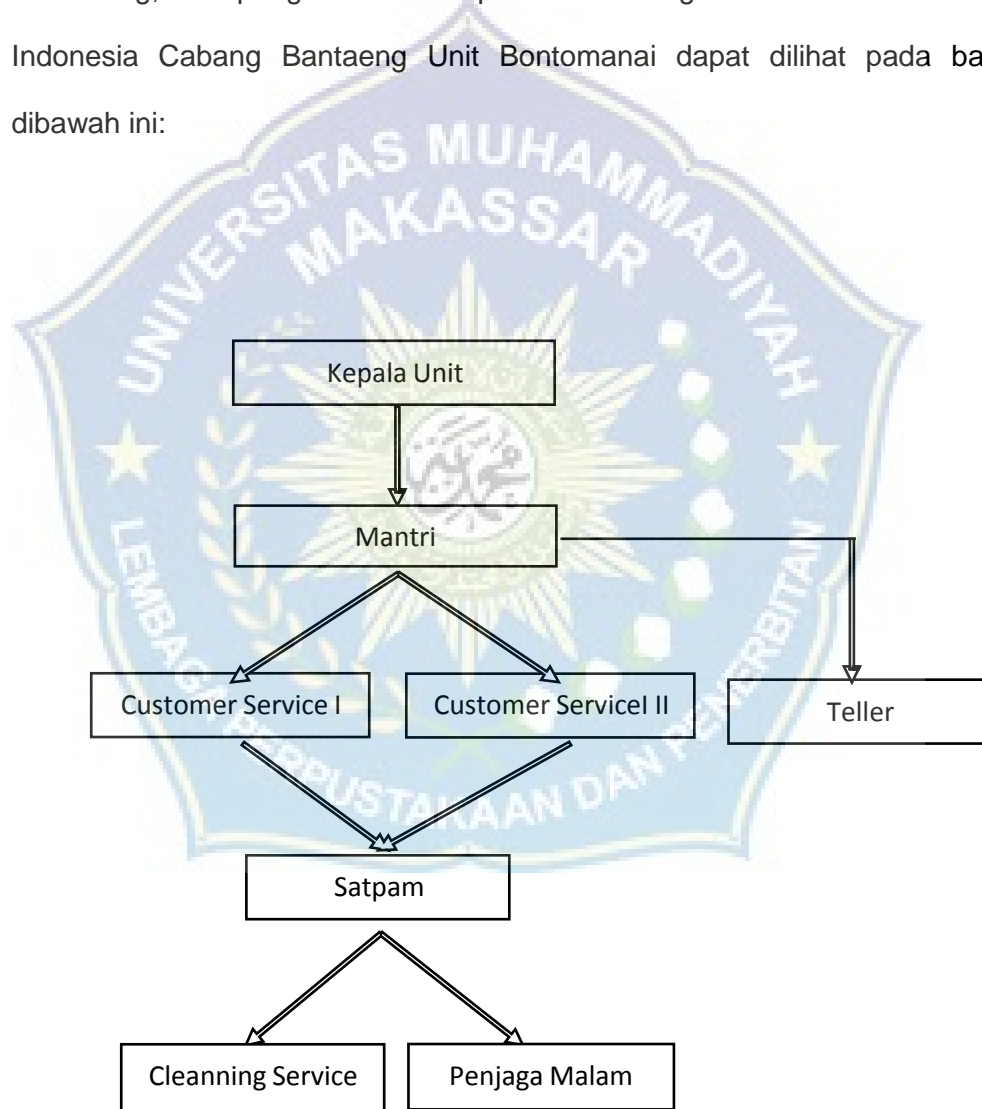
3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi pada setiap pegawai, demikian struktur organisasi dilakukan dengan cara yang sederhana dan efektif agar dapat bekerja dengan baik. Selain itu, organisasi biasa disebut sebagai struktur atau bagan organisasi. Dengan ini gambar skematis dari hubungan kerja antara orang-orang didalamnya dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.

Demikian pula dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai melakukan pekerjaan itu masing-masing sesuai dengan tugasnya dan satu sama lain saling berhubungan dan berupaya menciptakan suasana kerja yang disiplin dan dinamis untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

Oleh sebab itu, organisasi harus mampu menggambarkan dengan jelas setiap fungsi dan bagian yang ada pada organisasi.

Bagan struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai dapat dilihat bahwa semua tugas perencanaan berada dibawah satu tangan, demikian halnya dengan komando, wewenang, dan pengawasan. Adapun struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 2.2 Stuktur Organisasi

4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Unit (KAUNIT)

- 1) Memimpin Kantor BRI Unit dalam rangka menjamin kelancaran operasional BRI Unit.
- 2) Melakukan Pelayanan Prima (baik pihak extern maupun intern) untuk mencapai kepuasan nasabah dan keamanan bank.
- 3) Mengendalikan dan memecahkan masalah sistem operasional BRI Unit agar tidak menghambat pelaksanaan operasional.
- 4) Mengendalikan sistem administrasi pembukuan BRI Unit untuk keamanan dan pelayanan operasional.
- 5) Memeriksa dan menyetujui transaksi pembukuan.
- 6) Memeriksa semua kelengkapan bukti kas & dokumen lainnya setiap akhir hari.
- 7) Mengendalikan kualitas pelayanan kepada nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah:
 - a. Mengawasi kelancaran pelayanan kepada nasabah.
 - b. Turut membantu menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah.
 - c. Secara aktif memantau kegiatan nasabah dan memastikan bahwa nasabah telah dilayani dengan baik.
- 8) Menjamin keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor BRI Unitnya untuk kenyamanan nasabah.
- 9) Memonitor dan menganalisis laporan – laporan BRI Unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan melalui AMBM.

2. Teller (Receptionist bank).

- 1) Melakukan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan BRI
- 2) Memastikan kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI.
- 3) Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam ruang Teller untuk kelancaran pelayanan nasabah.
- 4) Memastikan kelengkapan bukti-bukti kas tunai dan OB yang berada dalam pengawasannya untuk menghindari penyimpangan kas Teller.
- 5) Menangani pelayanan langsung kepada nasabah seperti penyetoran dan pengambilan uang dari rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan administrasi peminjaman ataupun pembayaran hutang.

3. Customer Service / CS KUR

1. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah, dan nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lainnya di BRI Unit dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah Menatausahakan register yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman untuk kelancaran pengelolaan pinjaman.
2. Menatausahakan register pemberantasan tunggakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberantasan tunggakan.
3. Membuat dan mengadministrasikan laporan-laporan BRI Unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan kepada Kaunit dan Kanca.

4. Mantri

1. Menganalisis dan memeriksa permintaan pinjaman dan mengusulkan putusan pinjaman agar pinjamanyang diberikan layak dan aman bagi bank.
2. Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset.
3. Memperkenalkan dan memasarkan produk-produk BRI Unit dan untuk mencapai profit yang maksimal.
4. Melaksanakan pemberantasan tunggakan dan mengusulkan langkah-langkah penanggulangannya untuk meningkatkan kualitas pinjaman.

5. Pramubakti

Petugas ini bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan kantor.

6. Satpam

Satpam bertanggung jawab atas keamanan di sekitar kantor bank, mulai dari parkir, kenyamanan pelanggan dan keamanan gedung bank.

7. Penjaga Malam

Petugas ini bertanggung jawab atas keamanan gedung bank pada malam hari.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan penelitian secara langsung di kantor BRI Unit Bontomanai Cabang Bantaeng yang dilakukan pada

bulan Mei sampai Juni serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Unit, Mantri dan Customer service KUR, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Pengendalian Internal Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Struktur pengendalian internal di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng membantu pihak perusahaan sebelum mengambil keputusan, yang dibagi menurut pembagian tanggung jawab masing-masing terkait dengan struktur organisasi perusahaan. Serta struktur pengendalian internal ini juga dirancang dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan adanya struktur pengendalian internal ini dapat menjadi salah satu alat bantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas perusahaan dalam memberikan analisis, rekomendasi, bimbingan serta riview informasi dalam pemberian kredit. Namun untuk lebih memperjelas fokus penelitian ini, ada 2 dimensi dari perancangan hingga pengendalian operasional PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng sebagai berikut:

a. Perencanaan

Saat perencanaan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), bank memberikan syarat-syarat kepada calon nasabah sebelum memberikan

pinjaman, dilihat dari hasil wawancara bapak A sebagai PJS pengganti kepala unit bahwa:

“Kami di bank menetapkan persyaratan bagi calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman. persyaratan nasabah untuk mendapat KUR yakni:

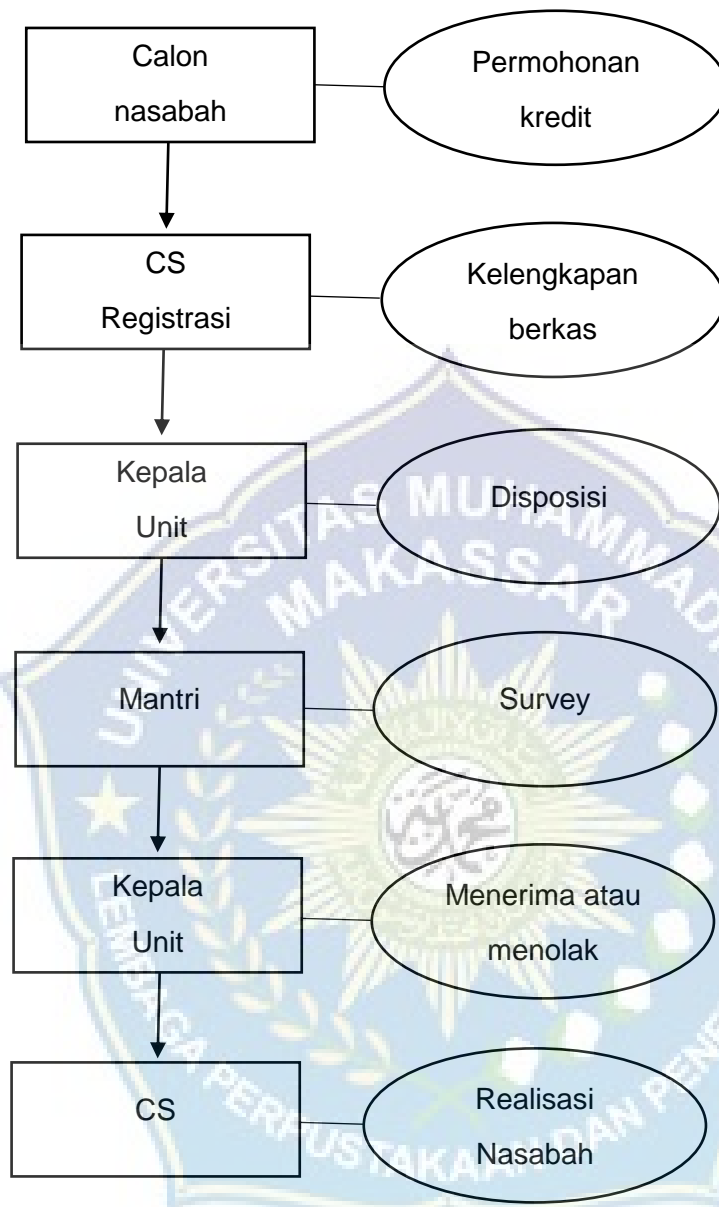
- a. Usaha sudah berjalan (minimal 6 bulan)*
- b. Pendaftaran komersial sun-wilayah atau kotamadya (tempat tinggal)*
- c. Membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP*
- d. Jaminan (menyesuaikan)*
- e. Bebas biaya dan premi asuransi*

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan ibu F selaku mantri di Bank Bri Unit Bontomanai Cabang Bantaeng, menyatakan bahwa:

“syarat-syarat yang perlu diperhatikan calon nasabah untuk permohonan kredit yaitu:

- a. Usaha sudah berjalan selama 6 bulan*
- b. Surat keterangan usaha*
- c. Kartu keluarga, KTP, buku nikah (jika sudah menikah), jika belum menikah usianya minimal 21 tahun keatas, sedangkan kalau sudah menikah tidak ada batasan usia*
- d. Bebas biaya*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat poin-poin khusus dalam persyaratan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah yang dipertimbangkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bontomanai Cabang Bantaeng Khususnya dalam penerbitan kredit usaha rakyat (KUR).



Gambar 2.3 Bagan Prosedur Pemberian Kredit

Gambar 2.3 merupakan bagan prosedur pemberian KUR terdapat tahap-tahap yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai cabang Bantaeng yaitu:

Calon nasabah mengajukan pinjaman lampiran dokumen seperti fotokopi kartu tanda penduduk suami istri, fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan usaha dari instansi terkait.

- a. Pihak customer service melakukan verifikasi kelengkapan berkas sesuai dengan berkas yang diserahkan oleh calon nasabah.
- b. Kepala unit melakukan pengecekan memo terhadap berkas calon nasabah.
- c. Mantri melakukan survey kelayakan usaha kepada para calon nasabah.
- d. Kepala unit memberi keputusan terkait calon nasabah apakah layak diberikan kredit atau tidak.
- e. Customer service mengimplementasikan keputusan kepala unit kepada calon nasabah.

Selanjutnya wawancara yang dilanjutkan oleh ibu T selaku mantri:

“Sebelum kredit diberikan kepada calon nasabah, terlebih dahulu kami melihat besaran usaha calon nasabah, kemudian jika usahanya cukup besar kemudian berkembang maka kita lihat seberapa besar kesanggupan nasabah dalam membayar pinjaman tersebut atau Repayment Capacity (RPC), jadi untuk BRI pinjamannya 100% dari RPC. Jadi terlebih dahulu menghitung RPCnya dan kemudian dapat menentukan berapa banyaknya pinjaman yang diberikan.”

Kemudian wawancara dengan bapak A selaku PJS (pengganti kepala unit).

“Jumlah minimal dan maksimal berasal dari kemampuan nasabah membayar atau melunasi (RPC) dengan memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran nasabah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam merencanakan prosedur sebelum memberikan kredit usaha rakyat, Bank memberikan perhatian khusus untuk

memberikan informasi kepada manajemen sebelum Bank melakukan survey terhadap nasabah.

b. Pengendalian Operasional

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng berawal dari proses implementasi strategi yang dilakukan bank tersebut sebagai bagian dari survey calon nasabah, sebagaimana dapat dilihat dalam wawancara dengan bapak A selaku PJS pengganti kepala unit.

“saat mengumpulkan informasi, Mantri mengunjungi nasabah secara langsung apakah usahanya sesuai dengan sertifikat komersial dan menentukan penggunaan kreditnya yang artinya untuk apa nasabah akan menggunakan kredit tersebut, karena di BRI ada 2 jenis kredit untuk KUR yaitu untuk investasi dan modal kerja (modal usaha), jika untuk modal usaha dengan tambahan usaha apabila penanaman modal tersebut dapat digunakan untuk merehabilitas lokasi atau perolehandal usaha.”

Selanjutnya, wawancara dengan ibu T sebagai Mantri menyatakan bahwa:

“kemudian ditentukan tingkat kemampuan membayar atau RPC nasabah dan dihitung berapa tingkat kemampuan membayar kemudian ditentukan berapa jumlah yang harus diberikan kepada nasabah. Setelah Mantri menyelesaikan survey, Mantri melaporkan hasil surveynya kepada kepala Unit sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan,”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka struktur pengendalian internal mampu mengendalikan dan mengukur serta mengelolah informasi yang dibutuhkan pimpinan untuk mengambil keputusan pada saat pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Prosedur Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng memiliki beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum mengajukan pinjaman yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibu T selaku Mantri, yaitu:

“Prosedur yang pertama itu prosedur administrasi, jadi sebelum kredit itu pasti ada permohonan dulu. Yang pertama, dilihat apakah dia layak untuk diberikan kredit dan dilihat dari segi usia kreditur, jika dia belum menikah minimal usianya itu harus 21 tahun keatas karena dia sudah secara umum layak untuk mengambil kredit.”

“Terus prosedur yang kedua dilihat dari segi kelengkapannya yaitu dari segi KTP, KK, NPWP, Surat Keterangan Usahnya. Setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses pemberian kredit dan proses pemberian kreditnya dapat dilihat dari hasil surveynya, dan setelah proses survey selesai dan dikatakan layak untuk membayar dengan jumlah tertentu akhirnya kita lanjut ke proses pencairan kredit”

3. Permasalahan dan pengambilan keputusan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng sering kali menemukan permasalahan-permasalahan dalam pemberian kredit kepada debitur dimana permasalahan tersebut berupa terjadinya kredit macet dan lain sebagainya. BRI Unit Bontomanai cabang bantaeng memiliki 3 format yang berfokus pada pengambilan keputusan dalam pemberian kredit yaitu sebagai berikut:

a. Penemuan Masalah

Hasil wawancara dengan bapak A selaku PJS (pengganti Kepala Unit) menyatakan bahwa:

“Saat meminjamkan sering kali terjadi kredit yang buruk, yang menjadi kendala bagi pihak Bank.”

Kemudian wawancara dengan ibu T selaku Mantri, yaitu:

“Salah satu kendala yang sering terjadi di pihak Bank yaitu terjadinya kredit macet”

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika karyawan Bank mengetahui adanya masalah pada nasabah yang menunjukkan tanda-tanda keterlambatan pembayaran, karyawan harus segera memberikan informasi tersebut kepada bagian pengembangan kredit tersebut agar terus memantau pelunasan kreditnya.

b. Pemecahan Masalah

Hasil wawancara dengan ibu T yang berprofesi sebagai Mantri mengatakan:

“Sudah disepakati dalam SPH (Surat Pengakuan Hutang), surat itu menyatakan berapa pinjaman yang diminta nasabah, berapa tahun nasabah mengambil pinjaman, berapa pelunasannya, tanggal berapa dia membayar, dan bagaimana cara dia membayarnya.”

Wawancara selanjutnya dengan bapak A selaku PJS:

“Ketika debitur dibatasi oleh kredit macet, kami melakukan penyelesaian rutin atau perbaikan kredit ketika debitur meninggal. Jika debitur meninggal dunia, dialihkan kepada anak atau keluarga untuk membayar sisa utang debitur yang meninggal. Pemograman ulang utang atau Restrukturisasi juga bias. Biasanya mereka juga mendapatkan SP (Surat Peringatan) dan menarik jaminan usahanya.”

Kemudian bapak A melanjutkan wawancara sebagai PJS:

“Dan jika peringatan kredit macet kepada nasabah sudah tidak terkendala, maka pihak kami akan mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman lagi. Karena jika macet, karena usaha masih bias dilayani jika debitur sudah melunasi sisa hutang yang lama maka akan diberikan lagi pinjaman dan adapun debitur yang tidak bisa diberikan kembali pinjaman jika karakter nasabahnya tidak bagus karena dalam pemberian kredit karakternya harus diperiksa terlebih dahulu karena meskipun usaha debitur lancar, tetapi tidak membayar secara teratur pihak BRI tidak dapat menerbitkan kembali kredit.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, langkah-langkah yang diterapkan Bank adalah identifikasi nasabah, analisis pencatatan dan pelaporan. Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman, bank menerapkan penagihan rutin dan penyesuaian kredit. Langkah ini sesuai dengan Restrukturisasi, Bank memperpanjang periode pembayaran pinjaman. Setelah dilakukan pengecekan terhadap pemeriksaan hasil pihak bank akan melakukan eksekusi jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran cicilan maka pihak bank akan melpakukan SP (Surat Peringatan) kepada nasabah yang telah dikonfirmasi belum melakukan pembayaran. Maka pihak bank akan membatalkan pinjaman sesuai kesepakatan yang dibuat nasabah dengan pihak bank sehubungan dengan pengajuan pinjaman.

c. Pengambilan Keputusan

pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan pihak bank berdasarkan informasi yang diberikan oleh bagian akuntansi untuk mengambil keputusan terbaik dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu dapat dilihat

dari hasil wawancara dengan bapak A sebagai PJS PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng menyatakan bahwa:

“kepala unit memutuskan proses pengambilan keputusan sebelumnya mantri langsung mendatangi nasabah dan kemudian mantri memberikan informasi kepala kepala unit tentang calon nasabah.”

Kemudian Pak A menyatakan bahwa:

“sebelum memutuskan kelayakan calon kredit bank akan mengkaji kriteria calon yang layak menerima KUR.”

Kemudian ibu T menyatakan bahwa:

“Berikut adalah kriteria-kriteria yang dilihat sebelum melakukan pengambilan keputusan.”

- a. *Character* (karakter) artinya kita melihat walaupun usahanya besar tetapi karakter nasabah tersebut tidak baik, maka bisa dijadikan tolak ukur untuk pemberian kredit.
- b. *Capacity* (kapasitas) artinya dilihat dari pengalaman debitur dalam mengelola usahanya.
- c. *Condition* (kondisi) artinya digunakan untuk memprediksi prospek usaha kedepan agar dapat mengantisipasi resiko kebangkrutan.
- d. *Collateral* (Agunan) dalam KUR sekarang agunan tidak masuk dalam kriteria.

Dalam tahap pengambilan keputusan PT. BRI Bontomanai Cabang Bantaeng bisa dikatakan memenuhi proses pengambilan keputusan yang efektif.

2. Pembahasan

Hasil dari penelitian bahwa struktur pengendalian internal ini juga berperan penting dalam pemberian kredit usaha rakyat dan juga dirancang dengan tujuan untuk menjaga keamanan data akuntansi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Struktur pengendalian internal ini juga dapat menjadi salah satu alat bantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas perusahaan dalam memberikan analisis, rekomendasi dalam pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng, dimana dalam penelitian ini memiliki beberapa fokus yang menjadi inti penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

1. Prosedur Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BRI Unit Bontomanai Cabang Bontomanai
 - a. Dokumen yang harus dipenuhi debitur dalam permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain fotocopy KTP, Kartu Keluarga, agunan asli objek yang dibiayai. Sedangkan dokumen yang harus dipenuhi oleh pihak BRI berupa Formulir Permohonan Kredit (FPK), dan Lembar Analisa Kredit.
 - b. Petugas yang bertanggungjawab atas permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah *customer service*.
 - c. Prosedur Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BRI Unit Bontomanai Cabang Bantaeng

- 1) Pendaftaran harus dilakukan di kantor BRI Unit setiap jam kerja. Calon debitur langsung datang ke kantor BRI Unit terdekat dengan membawa dokumen syarat (fotocopy KTP, KK, dan Agunan Asli) untuk permohonan kredit.
- 2) *Customer service* menerima pengajuan permohonan kredit dari calon debitur dan memeriksa kelengkapan dokumen syarat calon debitur antara lain copy KTP, KK, serta tanda bukti agunan objek yang dibiayai misalnya BPKB kendaraan bermotor atau Surat Hak Milik.
- 3) *Customer service* menyiapkan Formulir Permohonan Kredit (FPK) yang diberikan kepada debitur untuk di lengkapi dan di isi tentang data debitur, besarnya plafond kredit serta maksud dan tujuan kredit.
- 4) Memproses data calon debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID) untuk memastikan calon debitur tidak terikat dengan kredit program pemerintah lainnya. Jika terikat kredit dengan program lain maka dokumen permohonan kredit di kembalikan ke debitur jika tidak terikat maka permohonan kredit dilanjutkan.
- 5) Jika tidak terikat dengan kredit lain selanjutnya menyiapkan LAK yang di gunakan mantri untuk peninjauan lokasi ke tempat usaha debitur.
- 6) Semua dokumen dijadikan satu dalam map dan diserahkan ke mantri untuk proses analisa kredit lebih lanjut.

2. Prosedur Analisa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

- a. Dokumen yang digunakan dalam prosedur analisa Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai adalah LAK, FPK, dokumen syarat dari debitur, dan LH



- b. S.
- c. Petugas yang berwenang dalam pelaksanaan analisa kredit adalah mantri dan Ka Unit.
- d. Prosedur analisa Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

1) Bagian Mantri

- a) Mantri menerima dokumen permohonan kredit dan CS untuk analisa lebih lanjut.
- b) Mantri datang ke tempat usaha calon debitur untuk survei tempat usaha serta wawancara dan membuat LHS.
- c) LHS dijadikan satu kedalam map beserta dokumen permohonan kredit untuk memberi rekomendasi kredit dari hasil survei.
- d) Semua dokumen dijadikan satu kedalam map untuk diserahkan ke Ka Unit yang berwenang memberi keputusan apakah kredit ditolak atau disetujui.

2) Bagian Ka Unit

- a) Ka Unit menerima dokumen analisa kredit dan permohonan kredit dari mantri.
- b) Ka Unit melakukan rekomendasi ulang dan mengambil keputusan kredit.
- c) Jika hasil keputusan negatif (kredit ditolak) maka semua dokumen permohonan kredit dikembalikan kepada debitur.
- d) Jika hasil keputusan positif maka Ka Unit melakukan *approve* pada LAS.

- e) Semua dokumen kredit disetujui dikembalikan ke bagian mantri untuk diverifikasi ulang.

3) Bagian Mantri

- a) Bagian mantri menerima dokumen kredit disetujui dari Ka Unit.
- b) Mantri melakukan verifikasi ulang putusan Ka Unit pada LAS.
- c) Semua dokumen dijadikan satu ke dalam map dan diserahkan ke bagian CS untuk proses pencairan kredit.

3. Kebijakan Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

- a. Dokumen yang digunakan dalam pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai adalah LHS, FPK, LAK, Dokumen syarat permohonan kredit, SPH, dan KP.
- b. Petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pencairan kredit adalah CS dan Teller.
- c. Prosedur pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai.

1) Bagian *Customer Service*

- a) *Customer Service* menerima dokumen dari mantri.
- b) *Customer Service* menghubungi debitur untuk pengikatan kredit.
- c) *Customer Service* menyiapkan dokumen dari mantri.
- d) Debitur datang ke bank untuk melakukan pengikatan kredit.
- e) Mencatat data-data debitur dalam daftar pinjaman.
- f) Semua dokumen diserahkan kembali ke bagian mantri.

- g) *Customer Service* menyiapkan SPH rangkap dua untuk debitur dan arsip bagi bank.
- h) *Customer Service* membacakan isi SPH dihadapan debitur dan di tandatangani Ka Unit.
- i) Selanjutnya menyiapkan kwitansi pinjaman untuk pencairan kredit sebanyak tiga lembar dan di tandatangani oleh debitur, Ka Unit dan CS.
- j) SPH lembar pertama diserahkan ke debitur, lembar kedua diserahkan ke mantri untuk di arsip dan kwitansi pinjaman diserahkan ke teller untuk pencairan kredit.

2) Bagian Teller

- a) Teller menerima KP rangkap tiga dari CS.
- b) Teller memberi cap pada KP dan menyiapkan sejumlah uang sebesar kredit yang disetujui.
- c) KP lembar pertama diserahkan ke debitur beserta sebesar jumlah kredit yang disetujui. Dan KP lembar kedua dan ketiga dijadikan bukti untuk proses pencatatan.

4. Prosedur Pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

- a. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai adalah LHS, FPK, LAK, Dokumen syarat permohonan kredit, SPH, dan KP.
- b. Petugas yang berwenang dalam pencatatan KUR adalah Teller dan Mantri.

c. Prosedur pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai.

1) Bagian Teller

a) Dari bukti KP kemudian di jurnal melalui program IBS.

b) KP lembar kedua diarsip teller dan lembar ketiga diserahkan ke bagian mantri untuk diarsip.

2) Bagian Mantri

Menerima dokumen dari *Customer Service* dan kwitansi pinjaman dari teller untuk diarsip.

2. Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

a. Prosedur Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

Prosedur Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sudah terdapat pemisahan fungsi dalam melakukan permohonan kredit yang dilaksanakan oleh *customer service*, dokumen yang bersangkutan dengan permohonan kredit sudah lengkap dan dalam pelaksanaan prosedur permohonan kredit sudah berjalan sesuai ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sehingga dengan dilaksanakannya prosedur permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sesuai dengan kebijakan PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. maka resiko terjadinya kerja sama antara debitur dengan petugas yang berwenang dapat dihindari untuk meloloskan permohonan kredit. Karena sudah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan berwenang dalam permohonan kredit.

b. Prosedur Analisa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

Prosedur analisa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sudah dilakukan survei langsung ke tempat usaha calon debitur yang melakukan permohonan KUR. Ka Unit sudah melakukan analisis ulang terhadap data debitur sesuai hasil analisa mantri sebagai bahan untuk pengambilan keputusan kredit apakah calon debitur layak mendapatkan kredit atau tidak.

Dengan demikian resiko kredit macet dapat dihindari karena dalam pelaksanaan analisa sudah ditangani oleh fungsi yang terkait dan diotorisasi oleh pihak yang berwenang sehingga ada pihak yang bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan analisa kredit.

c. Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

Prosedur pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pejabat yang berwenang

sudah dilakukan oleh *customer service* dan teller. Dokumen yang digunakan sudah sesuai meskipun terdapat satu kekurangan yaitu SPH yang seharusnya dibuat rangkap hanya dibuat satu saja yang disimpan sebagai arsip bank sedangkan debitur tidak mempunyai SPH yang dapat digunakan sebagai *cross check* jika terjadi perbedaan besarnya kredit, angsuran atau bunga yang telah disepakati.

Dengan dilaksanakannya prosedur pencairan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka kecurangan antara debitur dengan pihak yang terkait dalam proses pencairan kredit dapat dihindari karena sudah dilaksanakan oleh fungsi yang berwenang dan telah dilakukan otorisasi yaitu teller sudah memberi cap dan tanda tangan sebagai keabsahan kwitansi pinjaman dan sudah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera di kwitansi pinjaman sesuai dengan kredit yang disetujui.

- d. Prosedur Pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai

Pelaksanaan prosedur pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yaitu pencatatan sudah melakukan system BRI Online. Dokumen yang digunakan sudah lengkap sesuai aturan yang diterapkan.

Dengan dilaksanakannya prosedur pencatatan yang sesuai maka resiko terjadi kesalahan pencatatan sangat kecil karena sudah

dilakukan oleh petugas yang berwenang sehingga ada yang mengontrol dalam pelaksanaan pencatatan kredit.

3. Struktur Pengendalian Internal Pada PT. BRI Unit Bontomanai Cabang Bantaeng Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Struktur pengendalian internal ini berfokus pada 2 dimensi yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Saat perencanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pihak bank memberikan ketentuan kepada calon debitur sebelum diberikan pinjaman dalam persyaratan pemberian kredit yang diajukan oleh calon nasabah, terdapat poin-poin tertentu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng terutama pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu:

- a. Memiliki usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan
- b. Membuat surat keterangan usaha dari kelurahan/kecamatan
- c. Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- d. Membawa fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- e. Tidak sedang menerima kredit produktif perbankan
- f. Membawa fotocopy dokumen jaminan

b. Pengendalian Operasional

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng muncul dari proses penerapan strategis yang dilakukan oleh

pihak bank Bersama dengan survey calon nasabah sebelum pihak bank mengambil keputusan.

4. Permasalahan dan pengambilan keputusan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Permasalahan dan pengambilan keputusan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini memiliki 3 fokus dimensi yaitu sebagai berikut:

a. Penemuan Masalah

Pihak bank dapat melihat dimana jika karyawan bank mengidentifikasi masalah nasabah yang menunjukkan tanda-tanda tunggakan, staf harus segera memberitahu bidang pengembangan kredit agar nasabah tetap terkendali selama periode pembayaran.

b. Pemecahan Masalah

Langkah-langkah yang digunakan oleh pihak bank dalam mengidentifikasi, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi nasabah jika terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman maka bank akan menerapkan pengambilan rutin dan penyesuaian kredit. Langkah ini sesuai dengan restrukturisasi agar bank memperpanjang periode pembayaran pinjaman. Jika nasabah tidak dapat melakukan cicilan, bank akan memeriksa hasilnya kemudian menerbitkan surat peringatan (SP) kepada nasabah yang telah dikonfirmasi belum melunasi pinjamannya.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak bank berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen untuk

menetapkan keputusan terbaik dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahap pengambilan keputusan, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng telah memenuhi tahap-tahap pengambilan keputusan yang efektif.

Berdasarkan keputusan diatas dapat disimpulkan bahwa, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng berusaha menerapkan dengan baik semua Langkah yang ada untuk meningkatkan pelayanannya. Dalam usahanya, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng mampu mencapai tujuan pinjaman yang efisien dengan menerapkan prosedur yang ada untuk memungkinkan pimpinan membuat keputusan yang sesuai dengan pemberian kredit. Dengan demikian, dapat dikaitkan bahwa sistem akuntansi manajemen terutama dalam pengambilan keputusan, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng merupakan alat bantu yang sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu Amirah (2020), Pemberian kredit, dan metode sistem pengendalian internal, baik kuantitatif maupun kualitatif, termasuk prosedur pemberian kredit dan sistem pengendalian internal PT. Bank Mega Cabang Makassar sangat baik dan jelas. PT. Bank Mega Cabang Makassar harus menyiapkan cara khusus untuk menemukan dan menelusuri penyimpangan dalam operasional, keuangan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dengan nasabah, debitur, dan pihak eksternal lainnya. Selain itu, berbeda halnya dengan penelitian terdahulu, Sonia Dwi Fatiah, Darminto, M.G. Wi Endang NP (2020) Upaya Pengendalian Internal: Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau deskriptif. Menurut temuan penelitian, mantri melakukan dua fungsi secara bersamaan. kelengkapan file. Ketika kredit tidak dapat diproses atau ditolak, bukti proses penolakan kredit tidak mencukupi, dan masih belum ada sertifikat penolakan kredit dengan alasan penolakan kredit. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada 2 variabel sehingga dapat dilihat bahwa struktur pengendalian internal dalam pemberian kredit sudah mampu mencapai tujuan secara efektif dengan menjalankan prosedur-prosedur yang sudah ada sehingga pimpinan dapat melakukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan pengambilan kredit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengevaluasi pengendalian internal pemberian kredit usaha rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian pengendalian internal pada bank ini sudah baik untuk menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha rakyat dan sesuai dengan kajian teori prosedur pemberian kredit. Meskipun pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng sudah menjalankan prosedur kredit dengan baik tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih timbul kredit bermasalah dikemudian hari yang disebabkan baik itu dari internal perusahaan maupun dari debitur/calon debitur. Kredit bermasalah disebabkan oleh salah satu faktor yang harus dikenali secara dini.

B. Saran

1. Sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng mempertegas lagi penerapan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan pada prosedur pemberian kreditnya, karena masih banyaknya pemohon kredit/calon kreditur yang memberikan informasi yang kurang benar untuk mendapatkan jumlah kredit yang diinginkan. tindakan ini upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah.
2. Sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng lebih memperhatikan analisis terhadap prospek usaha dan sumber

pendapatan lainnya dari kreditur. Karena ini akan menentukan bagaimana kemampuan kreditur untuk membayar kembali kewajibannya.

3. Kurangnya tenaga kerja pada unit ini sehingga biasanya terjadi kelambatan pada pencairan dan KUR. Contohnya pada bagian teller yang seharusnya ditambah lagi satu orang karena, kewalahan akan pencairan kredit dan pelayanan umum nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, K. S. (2014). *Analisis sistem pengendalian intern atas pemberian kredit usaha rakyat mikro studi kasus pada pt. Bank rakyat indonesia (persero), tbk., bank bri kantor wilayah semarang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis.
- Arifiyani, H. A., & Sukirno, S. (2012). *Pengaruh pengendalian intern, kepatuhan dan kompensasi manajemen Terhadap perilaku etis karyawan (studi kasus PT Adi satria abadi Yogyakarta)*. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 1(2), 1-21.
- Atriani. dan Maryana. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit*. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*.
- Cahyani, A. P., & Iswanaji, C. (2021). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang*. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 448-458.
- Cintya, M. (2015). *Evaluasi pelaksanaan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha mikro kecil menengah (Studi Kasus Bank UMKM Cabang Jember)*.
- Dianawati, N. M. D., & Ramantha, W. (2013). *Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional dan Pengalaman Kerja Auditor Internal terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Internal Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2013), 439-450.
- Effendi, S., & Harahap, B. (2020). *Pengaruh Sistem Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Oleh PT Bank OCBC NISP Tbk Kota Batam*. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 5(1), 37-46.
- Fatihah, S. D. (2014). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Halim, Abdul. 2015. *Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*, Edisi Lima, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

- Harun, H. (2013). *Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Pada BRI KCP Boulevard Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).
- Harun, Hesty. *Penerapan Spi Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Pada Bri Kcp Boulevard Manado*. Jurnal EMBA. Vol.1, No. 3.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT. Bumi Askara
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2016. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: PT. Bumi Askara
- Inryanny Astari, N. (2018). *Evaluasi sistem pengendalian internal pemberian kredit usaha rakyat (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk) (Doctoral dissertation, STEI INDONESIA JAKARTA)*.
- Kartika, A. (2017). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Unit Kota Pinang (Doctoral dissertation)*.
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Sebelas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Kedua Belas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumawati, Nugrahini. Dan Jimmi. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Kredit Macet*. Jurnal Akuntansi. Vol. 2, No. 1
- Mahmoeddin. 2010. *Melacak Credit Bermasalah*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama.
- Mahmud, i. I. *Evaluasi terhadap struktur pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada pt. Bri. Tbk (persero) unit pannampu makassar*.
- Miradewi, Artining, Luh. Admadja, Tunga, Anantawikrama. Dan Yuniarti, Adi, Gede. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit*. e-Journal. Vol. 2, No. 1
- Prasadhana,Dimas, Dhamara. Sulindawati,Erni, Gede, Ni Luh. Dan Sinarwati, Kadek, Ni. *Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Implementasi*

Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Menengah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuwatis.

Pratama, D. (2019). *Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagari Cabang Padang.*

Putra, Adi, Sulistya. Kertahadi. Dan Z.A, Zahro. *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern.* Jurnal Administrasi Bisnis.

Ramadhanti, A. F. (2022). *Analisis standar operasional prosedur (sop) pemberian kredit usaha rakyat (kur) pada pt bank negara indonesia (persero) tbk. Kantor cabang pembantu singaparna* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

Sitanggang, L. (2023). *Analisis sistem pengendalian internal pemberian kredit berbasis coso pada koperasi wanita parikesit desa bandarkedungmulyo kecamatan bandarkedungmulyo kabupaten jombang* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).



L

A

M

P

I

R

A

N



Transkrip Wawancara

1. Nama : Deddy Bestari

Jabatan : Kepala Pimpinan

No	Pertanyaan	Respon
1	Apa saja syarat-syarat yang perlu diperhatikan calon nasabah dalam permohonan kredit?	a) Usaha ada dan berjalan (min 6 bulan) b) Keterangan usaha dari kelurahan atau desa (domisili) c) Mempunyai fotocopy kartu keluarga dan KTP d) Jaminan (menyesuaikan) e) Bebas biaya dan biaya asuransi.
2	Apakah ada jumlah atau nominal yang diberikan pihak bank terhadap nasabah yang diberikan kredit?	Ada, jumlah nominal dan maksimal nanti dilihat dari kemampuan bayar nasabahnya atau Repayment Capacity (RPC) dengan menghitung dari pemasukan dan pengeluaran dari nasabah.
3	Apa saja prosedur-prosedur yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kredit?	Mantri mengunjungi langsung nasabahnya, apakah usahanya sesuai dengan yang tertera di

		<p>surat keterangan usaha.</p> <p>Menentukan penggunaan kreditnya yang artinya nasabahnya menggunakan kreditnya untuk apa, karena di BRI terdapat 2 macam kredit untuk KUR yaitu investasi dan modal usaha, kalau untuk modal usaha dengan tambahan modal usahanya, kalau investasi bisa sebagai perbaikan tempat usahanya ataupun pembelian sesuatu untuk modal usaha.</p>
4	Apakah ada kendala saat pemberian KUR?	Pada saat pemberian kredit sering terjadi kredit macet yang merupakan kendala bagi pihak nasabah
5	Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank ketika terjadi kredit macet?	Melakukan penagihan rutin ataupun perbaikan kredit jika debitur meninggal disampaikan kepada anak ataupun keluarga untuk melunasi sisa hutang debitur yang meninggal. Bisa juga dilakukan reschedule atau penjadwalan ulang. Dan

		biasanya juga diberikan SP.
6	Jika seorang debitur telah menyelesaikan kredit macetnya, apakah pihak bank akan tetap memberikan kredit atau berpikir ulang?	Tergantung, jika macet karena usaha masih bisa untuk dilayani jika debitur sudah melunasi sisa hutang yang lama baru dikasih kredit ulang dan Adapun debitur yang tidak bisa dikasih ulang kredit jika karakter nasabahnya tidak bagus, karena dalam pemberian kredit yang paling pertama dilihat yaitu karakter, karena walaupun usaha debitur besar tetapi tidak teratur dalam membayar maka BRI tidak bisa memberikan ulang kredit.

2. Nama : Abdi Azhari dan Tri

Jabatan : Mantri

No	Pertanyaan	Respon
1	Bagaimana pihak bank bisa mengetahui atau melihat kalau calon debiturnya mampu untuk membayar pinjaman kreditnya?	Dilihat dulu dari besaran usahanya kemudian kalau usahanya besar dan kemudian berkembang, kemudian kemampuan bayarnya atau

		<p>Repayment Capacity (RPC), jadi kalau di BRI pemberian kreditnya 100% dari RPC, jadi RPC nya dulu di hitung baru bisa ditentukan berapa kredit yang bisa dikasih.</p>
2	<p>Apa saja prosedur-prosedur yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kredit?</p>	<p>Setelah itu ditentukan dan dihitung besaran kemampuan bayar nasabah atau RPC, berapa kira-kira kemampuan bayarnya kemudian ditentukan berapa jumlah yang dapat ditentukan untuk diberikan ke nasabahnya</p>
3	<p>Bagaimana kriteria-kriteria nasabah yang berhak diberikan kredit usaha rakyat?</p>	<p>Di BRI terdapat 5 kriteria yang bisa dikatakan sebagai 5C yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Character (karakter) artinya kita lihat walaupun usahanya besar tapi kalau dilihat dari karakter orang tidak bagus maka akan dipertimbangkan untuk diberikan kredit. b) Capacity (kapasitas)

		<p>artinya melihat pengalaman debitur dalam mengelola usaha</p> <p>c) Capital (modal) artinya tingkat resiko yang siap di tanggung oleh pemilik dan keseriusan menjalankan usaha dan pembayaran kredit.</p> <p>d) Condition (kondisi) digunakan untuk memprediksi prospek usaha di masa yang akan datang dan prediksi risiko kemungkinan gagal bayar.</p> <p>e) Collateral (agunan), dalam KUR sekarang agunan tidak masuk dalam kriteria.</p>
4	Apakah ada perjanjian antara pihak bank dan nasabah pada saat proses pemberian kredit?	Ada dituangkan dalam SPH (surat pengakuan hutang), di dalam surat sudah di jelaskan berapa kreditnya nasabah yang diterima, berapa tahun nasabah

		mengambil kredit, angsurannya berapa, tanggal berapa dia membayar, kemudian tanggal berapa selesainya dan cara bayarnya bagaimana
--	--	---



Dokumentasi dengan Ibu Tri selaku PJS (Pengganti KA Unit)



Dokumentasi dengan Mantri BRI Unit Bontomanai cabang Bantaeng



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Nomor : 670/05/A.2-II/V/44/2023 Makassar, 29 Mei 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : SINDI ANTIKA

Stambuk : 105731107019

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : EVALUASI TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN
 INTERNAL ATAS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
 USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT
 INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG BANTAENG UNIT
 BONTOMANAI

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
 sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.



Audi Jam'an, S.E., M.Si
 NIM 105731107019

Tembusan:



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
II, Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail ip3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1661/05/C.4-VIII/VI/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Dzulqa'dah 1444 H
05 June 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 670/05/A.2-II/V/44/2023 tanggal 29 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SINDIATIKA
No. Stambuk : 10573 1107019
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EVALUASI TERHADAP STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG BANTAENG UNIT BONTOMANAI"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Juni 2023 s/d 8 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua IP3M,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
Dr. Ir. Mubakar Idhan, MP.
NIM 101 7716



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR CABANG
Jl. Kartini No.17 Bantaeng - Indonesia
Telepon 21995 - 21995 - Faks. 0413-21162

Bantaeng, 15 Juni 2023

Nomor : B.53- KC.XIII.LYI/06/2023
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Ketua LP3M
UNISMU-Makassar
DI-
Makassar

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor **1486/S/1/P25/2023** perihal permohonan Ijin penelitian Kepada Mahasiswa:

Nama : **Abdi Azzahra**
Nomor Pokok : **1051402119**
Program Studi : **Manajemen**

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melakukan Ijin penelitian di **Unit B.53- KC.XIII.LYI** Unit kami ini.

Sebagai bentuk kepercayaannya kami berikan izin penelitian.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

K. Sultan Kawadjo 208 Makassar, Gedung 10-1, 1114 makassar. muhammadiyah.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA	Sindi Antika			
NIM	105731107019			
PROGRAM STUDI	Akuntansi			
JUDUL SKRIPSI	Evaluasi Efektivitas Struktur Pengendalian Internal Atas Prosedur Pembelian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanan			
NAMA PEMBIMBING 1	Dr. Chairul Hsan Burhanuddin, SE.,M.Ak			
NAMA PEMBIMBING 2	Abd. Salam, SE.,M.SiAk,CA,SCP			
NAMA VALIDATOR	Namsjah, S.T., S.E., M.M			
No	Delapan	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan	Paraf*
	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya		Sudah Sesuai	
2	Hasil verbalim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya		Sudah Sesuai	
3	Hasil Uji Keabsahan Data		Sudah Sesuai	
4	Hasil deskripsi penelitian		Sudah Sesuai	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)		Sudah Sesuai	
6	Hasil analisis		Sudah Sesuai	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 229 Makassar 90222 Telp. (0411) 866072, 8613061, Fax. (0411) 862208

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sindi Antika

Nim : 105731107019

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10%
2	Bab 2	4%	25%
3	Bab 3	10%	10%
4	Bab 4	9%	10%
5	Bab 5	0%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 29 Desember 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan

Nim

Jl. Sultan Alauddin No. 229 Makassar 90222

Telpon (0411) 866072, 8613061, Fax (0411) 8665488

Website: www.library.umuhm.ac.id

E-mail: perpustakaan@umuhm.ac.id

Sindi Antika 105731107019 BAB



Submission date: 29-Dec-2023 11:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265415404

File name: SINDI_ANTIKA_BAB_I.docx (21.78K)

Word count: 1154

Character count: 8025

ndi Antika 105731107019 BAB I

ORIGINALITY REPORT

1%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



docplayer.info
Internet Source

1%



turnitin



Sindi Antika 105731107019 BAB

II

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Dec-2023 11:07AM (UTC+0700)
Submission ID: 2265415966
File name: SINDI_ANTIKA_BAB_II.docx (152.21K)
Word count: 4332
Character count: 29426



10	ilmucerdaspendidikan.wordpress.com Internet Source	<1 %
11	candraningsastrajawa.wordpress.com Internet Source	<1 %
12	idayoce.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	pt.scribd.com Internet Source	<1 %



Sindi Antika 105731107019 BAB

III

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Dec-2023 11:07AM (UTC+0700)
Submission ID: 2265416013
File name: SINDI_ANTIKA_BAB_III.docx (19.55K)
Word count: 627
Character count: 4408

Sindi Antika 105731107019 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

2 PUBLICATIONS

3% STUDENT PAPERS

LULUS

turnitin ID

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.umpe.ac.id Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	repository.usrn.ac.id Internet Source	1%
6	text-id.123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches On

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sindi Antika 105731107019 BAB

IV

by Iainap Tutup

Submission date: 29-Dec-2023 11:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265A16062

File name: SINDI_ANTIKA_BAB_IV.docx (294.67K)

Word count: 4821

Character count: 31743





Sindi Antika 105731107019 BAB



by Tahap Tutup

Submission date: 29-Dec-2023 11:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265416712

File name: SINDI_ANTIKA_BAB_V.docx (17.61K)

Word count: 211

Character count: 1449

Andi Antika 105731107019 BAB.V

ORIGINALITY REPORT


0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

LULUS

turnitin

Exclude quotes Exclude bibliographies Exclude matches



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS



Sindi Antika panggilan Sindi lahir di Gowa pada tanggal 16 Juli 2001 dari pasangan suami istri, Alm Bapak Abdul Siama dan Ibu Sohrah. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Tonrorita

Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Tonrorita lulus tahun 2013, MTs Yapit Tonrorita lulus tahun 2016, SMA Negeri 16 Gowa lulus tahun 2019. Dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

